



# Faktor yang mempengaruhi kinerja pembiayaan bagi hasil Bank Syariah di Indonesia

Dian Okviana

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Sleman, DIY, Indonesia

## Article History

Received : 19 April 2023  
Revised : 18 Juni 2023  
Accepted : 14 Agustus 2023  
Published : 1 Oktober 2023

## Keywords:

Good Corporate Governance; Investment Account Holders; Bank Capital; Assets and Financing Performance

## Corresponding author:

dian.okviana@gmail.com

## DOI:

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the effect of Good Corporate Governance on the Performance of Sharia Bank Profit Sharing in Indonesia, to analyze the effect of Investment Account Holders on the Performance of Sharia Bank Profit Sharing in Indonesia, to analyze the effect of Bank Capital on the Performance of Sharia Bank Profit Sharing in Indonesia and to analyze the influence of Bank Assets on the Performance of Sharia Bank Profit Sharing in Indonesia. The population in this study is the Sharia Commercial Bank and Sharia BPR companies that have been registered with Bank Indonesia until the end of 2014 until 2017. The sampling technique uses purposive sampling technique. The analytical tool used in this study is using multiple linear regression. Based on the results of the hypothesis test shows that Good Corporate Governance has a significant influence on the Performance of Profit Sharing; Investment Account Holders has a significant influence on the Performance of Revenue Sharing; There is no influence of Bank Capital on the Performance of Financing for Profit Sharing and Bank Assets that have a significant influence on the Performance of Profit Sharing.*

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia, untuk menganalisa pengaruh tingkat *Investment Account Holders* terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia, untuk menganalisa pengaruh Modal Bank terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia serta untuk menganalisa pengaruh *Assets* Bank terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Bank Umum Syariah dan BPR Syariah yang telah terdaftar di Bank Indonesia sampai akhir 2014 sampai 2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil; *Investment Account Holders* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil; Tidak ada pengaruh Modal Bank terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil serta *Assets* Bank mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil.



## PENDAHULUAN

Sama seperti halnya perusahaan lain, perbankan syariah juga diwajibkan memiliki tata kelola perusahaan yang baik, meskipun struktur tata kelola bank syariah berbeda dengan perbankan-perbankan konvensional. Perbedaan struktur tata kelola tersebut tidak bisa dilepaskan dari karakteristik bank syariah yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah. Dewan pengawas pada Bank syariah seharusnya bekerja sebagai mekanisme pengawasan perusahaan yang independen atau bebas untuk mencegah dewan komisaris dan manajemen perusahaan dari kegiatan investasi yang mempunyai risiko yang tinggi (Mollah *et al*, 2014). Sebagai pihak manajemen, pengelolaan bank syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada *shareholders* saja, tetapi juga terhadap *Investment Account Holders* yang bertindak sebagai pengelola dana investasi tersebut. *Investment Account Holders* dalam *Islamic Financial Services Act 2013* (IFSA) diartikan sebagai bentuk pemilik rekening dana investasi dengan penerapan akad syariah dengan tawaran *no-principal guarantee* sebagai tujuan dari investasi. Bank berada pada kendali kewenangan dari pemegang saham serta bagi *Investment Account Holders* berfungsi sebagai tujuan dilakukannya sebuah investasi.

Kemudian, bank syariah akan berinvestasi menggunakan dana *Investment Account Holders* tersebut untuk kegiatan yang diperbolehkan menurut aturan dan syariat Islam. Banyak investor yang lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka sebagai *Investment Account Holders* dibandingkan sebagai kepemilikan saham dari bank syariah. Hal ini disebabkan karena dalam Islam tidak diperbolehkan adanya unsur bunga (*interest*), sehingga bank syariah menawarkan bentuk jasa lain dari layanan yang ada sesuai yang diperbolehkan dalam syariah Islam, salah satunya yaitu syirkah. Syirkah yaitu kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan dan apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada hasil penelitian Setyawan dan Adityawarman (2017), menunjukkan adanya pengaruh antara jumlah anggota dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan *Investment Account Holders* terhadap kinerja pada perusahaan keuangan syariah dari tahun 2010-2016. Tiga variabel independen yang diuji (jumlah anggota dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan *Investment Account Holders*) terbukti bahwa terdapat satu variabel tersebut memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja, yaitu *Investment Account Holders* yang berarti bahwa *Investment Account Holders* dapat menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan perbankan. Semakin banyak nasabah yang dimiliki suatu bank, maka tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan akan semakin luas dan jumlah anggota dewan komisaris, independensi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja bank syariah, yang berarti bahwa jumlah anggota dewan yang lebih kecil dapat lebih efektif dalam membagi peran pengawasan dalam memantau kinerja dan menciptakan nilai bagi bank-bank Islam dengan cara memberikan masukan yang tepat kepada manajemen perusahaan sehingga kinerja bank syariah menjadi lebih baik.

Berdasarkan research gap dan adanya limitasi pengetahuan mengenai konsep kinerja pembiayaan bagi hasil terkait konsep keuangan pada perbankan syariah serta kurangnya penelitian pada perusahaan perbankan, seperti efektifitas dewan, yang lebih spesifik dan mekanisme pemantauan yang kompleks (Rachdi dan Ameer, 2011) , perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel kontrol yang diduga mempengaruhi kinerja pembiayaan bagi hasil serta mempertimbangkan skor GCG dalam mengukur *Good Corporate Governance* sehingga peneliti berniat untuk meneliti lebih dalam tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Investment Account Holders* Terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia”.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil

Implementasi Corporate governance yang baik menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah menerapkan pedoman good corporate governance dengan baik. Secara teoritis, penerapan Corporate governance yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan sebab akan mengurangi resiko perusahaan dari keputusan pihak manajemen yang cenderung mengatasnamakan kepentingan pribadi. Penerapan Good Corporate Governance dapat meningkatkan tingkat kepercayaan para investor. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) bahwa direksi adalah sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. Namun dalam pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu tugas kepengurusan, tugas manajemen risiko, tugas pengendalian internal, tugas komunikasi, dan tugas tanggung jawab sosial.

Dewan Direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaannya dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Semakin banyak komposisi anggota dewan direksi, akan semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggota, yang tentunya akan berdampak positif bagi para stakeholder. Selain itu, semakin banyak anggota dewan direksi, akan membuat network dengan pihak luar perusahaan akan menjadi lebih baik hal tersebut akan membuat kinerja perusahaan akan semakin membaik. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Nugroho dan Raharjo (2014) yang mengatakan bahwa ukuran dewan direksi akan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian Rahmawati et al (2017) menunjukkan bahwa secara parsial variabel dewan direksi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penerapan Good Corporate Governance saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. Good Corporate Governance diperlukan agar memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan dan dapat menjadikan perusahaan tetap eksis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dewan direksi bertanggung jawab atas seluruh fungsi manajerial, yang meliputi pengembangan dan eksekusi strategi korporasi, pengamanan sumber daya, penilaian kinerja, penyajian laporan keuangan yang wajar, dan peningkatan nilai jangka panjang (Rezaee 2007). Dengan demikian salah satu area tanggung jawab direksi bank syariah adalah operasi bank. Ketika dewan direksi terlibat langsung dalam operasional mikro maka risiko bank akan dapat ditekan.

Direksi bank syariah memiliki kewajiban melaksanakan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan BUS dan UUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Fungsi direksi paling tidak meliputi kegiatan audit internal, manajemen risiko dan komite manajemen risiko, dan kepatuhan. Rapat direksi memiliki peran krusial karena pasal 31 dalam PBI. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menentukan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat direksi. Dengan demikian semakin intens rapat dewan direksi dilakukan maka semakin rendah risiko pembiayaan bank syariah. Setiap terdapat permasalahan mendesak terkait risiko pembiayaan, dapat segera ditangani segenap jajaran bank syariah mengacu pada kebijakan dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat dewan direksi (Mutmainah, 2017).

Sedangkan Forum Corporate Governance Indonesia (2001) menjelaskan bahwa Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Proporsi komisaris independen menjadi masalah penting karena pedoman GCG Indonesia menentukan bahwa jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif. Diduga semakin besar proporsi komisaris independen fungsi pengawasan akan semakin ketat dan pemberian nasihat semakin rutin. Banyaknya nasehat dan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris juga diduga tercermin dari banyaknya pertemuan internal dewan komisaris maupun pertemuan dewan komisaris dengan dewan direksi (Mutmainah, 2017).

Adanya Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasional serta jalannya bank syariah agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tingkat kepatuhan syariah di bank syariah dengan peran pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi yang dimiliki oleh DPS memiliki hubungan yang sangat erat. Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, di mana kepatuhan syariah semakin penting untuk melakukan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan syariah terhadap hukum Islam. Akan tetapi yang terjadi di dalam praktiknya, pengawasan aspek syariah ini belum maksimal. Hal tersebut terjadi karena beberapa aspek, di antaranya adalah belum optimalnya peran, manajemen organisasi maupun kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah. Salah satu penyebabnya masih rendahnya tingkat kepatuhan bank Syariah adalah karena belum idealnya komposisi dari Dewan Pengawas Syariah yang mayoritas diisi oleh para akademisi syariah dan belum mengakomodir para praktisi bidang ekonomi, keuangan maupun akuntansi. Selain itu disebabkan belum kuatnya peran DPS, juga dikarenakan pengawasan syariah pada bank syariah lebih banyak dilakukan oleh Divisi Kepatuhan Syariah semata. Kenyataannya Dewan Pengawas Syariah di bank syariah selama ini masih banyak yang hanya dijadikan sebagai obyek pelengkap pada sebuah institusi perbankan syariah, yang berfungsi untuk sekedar mengisi struktur di institusi perbankan syariah.

Susana dan Prasetyanti (2011) mengemukakan bahwa Bank syariah dengan produk utamanya yang berupa simpanan dan pembiayaan (pinjaman), yang ditunjang dengan jasa lain-lainnya yang operasionalnya hampir sama dengan bank konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil terutama pada produk simpanan dan pembiayaan. Perbankan syariah dapat dipastikan bebas dari riba/bunga dan sebagai gantinya adalah sistem bagi hasil yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Masyarakat luas khususnya masyarakat yang sering melakukan transaksi perbankan kurang mengetahui apa dan bagaimana sistem bagi hasil dijalankan dalam operasional bank syariah, khususnya dalam sistem bagi hasil pembiayaan pada bank syariah.

Ukuran board of director (komisaris) yang lebih besar memungkinkan perolehan informasi yang lebih banyak terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi perusahaan seperti market, teknologi, peraturan-peraturan terkait dan lainlain yang akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan monitoring dan pemberian nasihat oleh dewan komisaris. Namun begitu ukuran board of director yang besar dirasakan kurang efektif untuk melakukan koordinasi, dan membutuhkan biaya yang tinggi untuk melakukan koordinasi sehingga akan sangat mempengaruhi kinerja bagi hasil (Kholid dan Bachtiar, 2015).

**H<sub>1</sub>: *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil**

### **Pengaruh *Investment Account Holders* terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil**

Manajemen bank syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada *shareholders* saja, tetapi juga terhadap *Investment Account Holders* yang bertindak sebagai pengelola dana investasi tersebut. Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA) menyebutkan *Investment Account Holders* diartikan sebagai pemilik rekening dana investasi dengan penerapan kontrak syariah dengan fitur *no-principal guarantee* sebagai tujuan dari investasi. Pihak Bank berada dibawah kewenangan dari pemegang saham serta bagi *Investment Account Holders* berfungsi sebagai tujuan untuk dilakukannya kegiatan investasi. Kemudian, bank syariah berinvestasi menggunakan dana *Investment Account Holders* untuk kegiatan yang diperbolehkan menurut aturan dan syariat islam. Saat ini, banyak investor yang lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka sebagai *Investment Account Holders* dibandingkan sebagai kepemilikan saham dari bank syariah. Hal ini disebabkan karena dalam islam tidak diperbolehkan adanya unsur bunga (*interest*), sehingga bank syariah menawarkan bentuk lain dari layanan yang ada, yang diperbolehkan dalam islam, salah satunya yaitu syirkah. Syirkah yaitu kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan dan apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama.

*Investment Account Holder* merupakan struktur kepemilikan pada perbankan yang sumbernya berasal dari dana nasabah atau dalam penelitian ini diproksikan dengan dana pihak ketiga. *Investment Account Holder* menentukan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan berdampak pada tingkat pengungkapan laporan keuangan, jadi, *Investment Account Holder* merupakan salah satu pilar terpenting bagi perbankan syariah, karena *Investment Account Holder* yang menopang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah.

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholder-nya, terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. Stakeholder atau nasabah (IAH) menginginkan perusahaan tidak hanya menjelaskan aktivitas bisnisnya saja, namun harus tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya, yaitu dengan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ini akan berdampak terhadap hubungan yang harmonis antara nasabah dengan bank syariah (Kurniawansyah, 2016).

*Investment Account Holders* memberikan peranan terhadap kinerja perusahaan karena perusahaan dapat menggunakan *Investment Account Holders* untuk melakukan kegiatan operasional atau kegiatan perusahaan lainnya. (Farook *et al*, 2011) menerangkan bahwa rekening bank syariah lebih mudah diakses daripada saham-saham, meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal, namun tetap dapat mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham. Secara legitimasi, dengan banyaknya jumlah *Investment Account Holders* yang ada di

perbankan, maka semakin banyak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena jumlah *Investment Account Holders* yang besar di dalam perbankan otomatis semakin banyak pula dana nasabah yang menggunakan jasa *Investment Account Holders* tersebut. Semakin banyak *Investment Account Holders* yang ada di sebuah perbankan, maka semakin banyak tingkat pengungkapan dan pengawasan yang dilakukan.

Semakin banyaknya *Investment Account Holders* secara otomatis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebuah perbankan bisa dikatakan baik. Struktur kepemilikan merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian *Investment Account Holders* yang besar di sebuah perbankan, secara otomatis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebuah perbankan juga baik dikarenakan besarnya animo masyarakat tersebut. Sejumlah penelitian terdahulu telah meninjau pengaruh struktur kepemilikan modal terhadap kinerja bank syariah (Abbas *et al*, 2009).

**H<sub>2</sub> : *Investment Account Holders* mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil**

## METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Bank Umum Syariah dan BPR Syariah yang telah terdaftar di Bank Indonesia sampai akhir 2014 sampai 2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan sampel penelitian berdasarkan beberapa kriteria, kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Bank Umum Syariah dan BPR Syariah tersebut tetap terdaftar dan aktif di pasar sekunder sampai tahun 2017 dan menyajikan laporan keuangan dari periode 2014-2017.
2. Perusahaan Bank Umum Syariah dan BPR Syariah tersebut memiliki data yang lengkap terkait dengan rasio.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance*, *Investment Account Holders* dan variabel kontrol menggunakan modal dan *assets* perbankan yang digunakan untuk mengukur pengaruh terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil.

### a. *Good Corporate Governance* (GCG)

*Corporate Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Pada prinsipnya *Corporate Governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham; perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham; peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*, transparansi dan penjelasan serta peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

*Corporate Governance* diukur dengan menggunakan *Corporate Governance Index*.

*Corporate Governance Index* adalah program riset dan pemeringkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia pada perusahaan publik yang diselenggarakan oleh IICG. *The Indonesian Institute of Corporate governance* (IICG) adalah sebuah lembaga independen yang melakukan diseminasi dan pengembangan *corporate governance* di Indonesia. Dalam penelitian ini *Corporate Governance Index* diambil dari data yang dihasilkan IICG. Dalam penelitian ini, skor GCG yang digunakan adalah skor pada tahun 2014 – 2017.

#### **b. Investment Account Holders (IAH)**

Definisi *Investment Account Holders* mengacu pada Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA) diartikan sebagai pemilik rekening dana investasi dengan penerapan kontrak syariah dengan fitur *no-principal guarantee* sebagai tujuan dari investasi. *Investment Account Holders* memberikan peran terhadap peningkatan kinerja perusahaan karena perusahaan dapat menggunakan *Investment Account Holders* untuk melakukan kegiatan operasional atau kegiatan perusahaan lainnya. *Investment Account Holder* merupakan struktur kepemilikan pada perbankan yang sumbernya berasal dari dana pihak nasabah atau dalam penelitian ini diproksikan dengan dana pihak ketiga. *Investment Account Holder* menentukan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan berdampak pada tingkat pengungkapan laporan keuangan, jadi, *Investment Account Holder* merupakan salah satu pilar terpenting bagi perbankan syariah, karena *Investment Account Holder* yang menopang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah.

#### **c. Modal Bank**

Modal adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak pertama pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian (*risk loss*). Modal juga merupakan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham yang harus selalu berada dalam bank dan tidak ada kewajiban pengembalian atas penggunaannya (Abbas *et al*, 2009). Pengukuran modal bank dihitung menggunakan besarnya dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai kegiatan usaha bank yang jumlahnya telah ditetapkan.

#### **d. Assets Bank**

Aktiva atau asset adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Aset itu adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Yang dapat dimasukkan ke dalam kolom asset salah satunya adalah gedung atau bangunan. Jadi kalau suatu perusahaan memiliki gedung senilai satu miliar, maka asset yang dihitung adalah satu miliar itu. Selain gedung, yang bisa dihitung sebagai asset bisa termasuk: merk dagang, paten teknologi, uang kas, mobil, dan lain lain (Chapra, 2007).



### e. Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil

Kinerja perbankan syariah dapat menunjukkan seberapa besar bank syariah mencapai tujuannya. Kinerja perusahaan diuji dalam tiga dimensi. Pertama, dimensi produktivitas perusahaan, atau pengolahan input menjadi output secara efisien. Kedua, dimensi profitabilitas, atau tingkat dimana pendapatan perusahaan melebihi biaya yang dikeluarkan. Dimensi ketiga adalah premi pasar, atau tingkat dimana nilai pasar perusahaan melebihi nilai bakunya (Walker, 2001). Formula Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil diukur dengan *Outstanding Share Pokok Pembiayaan*. Itu *Outstanding Share* adalah semua saham yang dimiliki oleh perusahaan, baik *basic shares* dan *diluted shares*. Apabila sebuah perusahaan memiliki *diluted share* maka potensi akan peningkatan jumlah *outstanding share company* tersebut di masa depan akan sangat meningkat. Dengan kata lain ini perusahaan yang memiliki *diluted shares* adalah perusahaan yang mempunyai masa depan yang baik untuk dijadikan target investasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data

Analisis regresi linier berganda di gunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel *Good Corporate Governance*, *Investment Account Holders*, Modal Bank dan *Assets Bank* terhadap variabel Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia. Hasil perhitungan regresi linier berganda dengan program SPSS disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1 Regresi Linier Berganda

Variabel	Koef.Reg	t	Sig
(Constants)		.323	
GCG	2.712	2.600	.021
IAH	.100	3.761	.001
Modal	.050	.205	.839
Assets	.774	32.8	.000
Adj. R Square		.099	

Sumber: Data diolah

### Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari hasil perhitungan, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel *Good Corporate Governance* sebesar 0,021. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau ( $0,021 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak; yang berarti *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil. Implementasi *Corporate governance* yang baik menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah menerapkan pedoman *good corporate governance* dengan baik. Secara teoritis, penerapan *Corporate governance* yang

baik dapat meningkatkan nilai perusahaan sebab akan mengurangi resiko perusahaan dari keputusan pihak manajemen yang cenderung mengatasnamakan kepentingan pribadi. Penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan tingkat kepercayaan para investor. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) bahwa direksi adalah sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing.

Penerapan *Good Corporate Governance* saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. *Good Corporate Governance* diperlukan agar memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan dan dapat menjadikan perusahaan tetap eksis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dewan direksi bertanggung jawab atas seluruh fungsi manajerial, yang meliputi pengembangan dan eksekusi strategi korporasi, pengamanan sumber daya, penilaian kinerja, penyajian laporan keuangan yang wajar, dan peningkatan nilai jangka panjang (Rezaee 2007). Dengan demikian salah satu area tanggung jawab direksi bank syariah adalah operasi bank. Ketika dewan direksi terlibat langsung dalam operasional mikro maka risiko bank akan dapat ditekan.

Direksi bank syariah memiliki kewajiban melaksanakan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan BUS dan UUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Fungsi direksi paling tidak meliputi kegiatan audit internal, manajemen risiko dan komite manajemen risiko, dan kepatuhan. Rapat direksi memiliki peran krusial karena pasal 31 dalam PBI. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menentukan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat direksi. Dengan demikian semakin intens rapat dewan direksi dilakukan maka semakin rendah risiko pembiayaan bank syariah. Setiap terdapat permasalahan mendesak terkait risiko pembiayaan, dapat segera ditangani secepatnya jajaran bank syariah mengacu pada kebijakan dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat dewan direksi (Mutmainah, 2017).

Sedangkan Forum Corporate Governance Indonesia (2001) menjelaskan bahwa Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk

mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan monitoring manajemen semakin baik. Jika lebih banyak komposisi dewan komisaris, perusahaan akan lebih diawasi dan dapat meminimalisasi kecurangan dalam perusahaan sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Dewi dan Widagdo (2012) yang mengatakan bahwa bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian Rahmawati *et al* (2017) menunjukkan bahwa secara parsial variabel dewan komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance dengan baik (KNKG, 2006). Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi pengawasan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari pemahaman mengenai teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjembatani kepentingan prinsipal dan agen pada perusahaan.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Tanggung jawab utamanya adalah memilih CEO yang berkompeten dan etis, memonitor tujuan operasional, finansial, dan strategi keberlanjutan yang dilakukan manajemen (Rezaee 2007). Selain itu, tingkat pengawasan, dewan komisaris memiliki peran esensial dalam hal fungsi pemberian nasihat (*advisory function*). Rezaee (2007) menyatakan terdapat beberapa atribut yang memengaruhi kualitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Salah satunya adalah independensi dewan. Independensi dewan komisaris merupakan suatu aspek tata kelola penting yang berdampak pada efektivitas fungsinya (Rezaee 2007). Komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG 2006). Proporsi komisaris independen menjadi masalah penting karena pedoman GCG Indonesia menentukan bahwa jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif. Diduga semakin besar proporsi

komisaris independen fungsi pengawasan akan semakin ketat dan pemberian nasihat semakin rutin.

Banyaknya nasehat dan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris juga diduga tercermin dari banyaknya pertemuan internal dewan komisaris maupun pertemuan dewan komisaris dengan dewan direksi (Mutmainah, 2017). Adanya Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasional serta jalannya bank syariah agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tingkat kepatuhan syariah di bank syariah dengan peran pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi yang dimiliki oleh DPS memiliki hubungan yang sangat erat. Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, di mana kepatuhan syariah semakin penting untuk melakukan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan syariah terhadap hukum Islam. Akan tetapi yang terjadi di dalam praktiknya, pengawasan aspek syariah ini belum maksimal. Hal tersebut terjadi karena beberapa aspek, di antaranya adalah belum optimalnya peran, manajemen organisasi maupun kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah. Salah satu penyebabnya masih rendahnya tingkat kepatuhan bank Syariah adalah karena belum idealnya komposisi dari Dewan Pengawas Syariah yang mayoritas diisi oleh para akademisi syariah dan belum mengakomodir para praktisi bidang ekonomi, keuangan maupun akuntansi. Selain itu disebabkan belum kuatnya peran DPS, juga dikarenakan pengawasan syariah pada bank syariah lebih banyak dilakukan oleh Divisi Kepatuhan Syariah semata. Kenyataannya Dewan Pengawas Syariah di bank syariah selama ini masih banyak yang hanya dijadikan sebagai obyek pelengkap pada sebuah institusi perbankan syariah, yang berfungsi untuk sekedar mengisi struktur di institusi perbankan syariah.

Susana dan Prasetyanti (2011) mengemukakan bahwa Bank syariah dengan produk utamanya yang berupa simpanan dan pembiayaan (pinjaman), yang ditunjang dengan jasa lain-lainnya yang operasionalnya hampir sama dengan bank konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil terutama pada produk simpanan dan pembiayaan. Perbankan syariah dapat dipastikan bebas dari riba/bunga dan sebagai gantinya adalah sistem bagi hasil yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Masyarakat luas khususnya masyarakat yang sering melakukan transaksi perbankan kurang mengetahui apa dan bagaimana sistem bagi hasil dijalankan dalam operasional bank syariah, khususnya dalam sistem bagi hasil pembiayaan pada bank syariah.

Dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan operasional bank. Dewan komisaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa direksi telah tindaklanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam. Dewan komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris. Ukuran *board of director*

(komisaris) yang lebih besar memungkinkan perolehan informasi yang lebih banyak terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi perusahaan seperti market, teknologi, peraturan-peraturan terkait dan lainlain yang akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan monitoring dan pemberian nasihat oleh dewan komisaris. Namun begitu ukuran *board of director* yang besar dirasakan kurang efektif untuk melakukan koordinasi, dan membutuhkan biaya yang tinggi untuk melakukan koordinasi sehingga akan sangat mempengaruhi kinerja bagi hasil (Kholid dan Bachtiar, 2015) .

### **Pengaruh *Investment Account Holders* terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari hasil perhitungan, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel *Investment Account Holders* sebesar 0,001. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau  $(0,001 < 0,05)$ , maka  $H_0$  ditolak; yang berarti *Investment Account Holders* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil.

Manajemen bank syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada *shareholders* saja, tetapi juga terhadap *Investment Account Holders* yang bertindak sebagai pengelola dana investasi tersebut. Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA) menyebutkan *Investment Account Holders* diartikan sebagai pemilik rekening dana investasi dengan penerapan kontrak syariah dengan fitur *no-principal guarantee* sebagai tujuan dari investasi. Pihak Bank berada dibawah kewenangan dari pemegang saham serta bagi *Investment Account Holders* berfungsi sebagai tujuan untuk dilakukannya kegiatan investasi. Kemudian, bank syariah berinvestasi menggunakan dana *Investment Account Holders* untuk kegiatan yang diperbolehkan menurut aturan dan syariat islam. Saat ini, banyak investor yang lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka sebagai *Investment Account Holders* dibandingkan sebagai kepemilikan saham dari bank syariah. Hal ini disebabkan karena dalam islam tidak diperbolehkan adanya unsur bunga (*interest*), sehingga bank syariah menawarkan bentuk lain dari layanan yang ada, yang diperbolehkan dalam islam, salah satunya yaitu syirkah. Syirkah yaitu kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan dan apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama.

*Investment Account Holder* merupakan struktur kepemilikan pada perbankan yang sumbernya berasal dari dana nasabah atau dalam penelitian ini diproksikan dengan dana pihak ketiga. *Investment Account Holder* menentukan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan berdampak pada tingkat pengungkapan laporam keuangan, jadi, *Investment Account Holder* merupakan salah satu pilar terpenting bagi perbankan syariah, karena *Investment Account Holder* yang menopang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah.

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholder-nya, terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk

aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. Stakeholder atau nasabah (IAH) menginginkan perusahaan tidak hanya menjelaskan aktivitas bisnisnya saja, namun harus tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya, yaitu dengan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ini akan berdampak terhadap hubungan yang harmonis antara nasabah dengan bank syariah (Kurniawansyah, 2016).

*Investment Account Holders* memberikan peranan terhadap kinerja perusahaan karena perusahaan dapat menggunakan *Investment Account Holders* untuk melakukan kegiatan operasional atau kegiatan perusahaan lainnya. (Farook *et al*, 2011) menerangkan bahwa rekening bank syariah lebih mudah diakses daripada saham-saham, meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal, namun tetap dapat mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham.

Secara legitimasi, dengan banyaknya jumlah *Investment Account Holders* yang ada di perbankan, maka semakin banyak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena jumlah *Investment Account Holders* yang besar di dalam perbankan otomatis semakin banyak pula dana nasabah yang menggunakan jasa *Investment Account Holders* tersebut. Semakin banyak *Investment Account Holders* yang ada di sebuah perbankan, maka semakin banyak tingkat pengungkapan dan pengawasan yang dilakukan.

Semakin banyaknya *Investment Account Holders* secara otomatis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebuah perbankan bisa dikatakan baik. Struktur kepemilikan merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian *Investment Account Holders* yang besar di sebuah perbankan, secara otomatis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebuah perbankan juga baik dikarenakan besarnya animo masyarakat tersebut. Sejumlah penelitian terdahulu telah meninjau pengaruh struktur kepemilikan modal terhadap kinerja bank syariah (Abbas *et al*, 2009).

### **Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk variabel kontrol dalam penelitian ini menggunakan variabel modal dan assets bank. Variabel assets bank mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil namun modal bank tidak ada pengaruh terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil. Modal adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak pertama pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian (*risk loss*). Modal juga merupakan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham yang harus selalu berada dalam bank dan tidak ada kewajiban pengembalian atas penggunaannya (Abbas *et al*, 2009). Pengukuran modal bank dihitung menggunakan besarnya dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai kegiatan usaha bank yang jumlahnya telah ditetapkan. Aktiva atau asset adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha

di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Aset itu adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Yang dapat dimasukkan ke dalam kolom asset salah satunya adalah gedung atau bangunan. Jadi kalau suatu perusahaan memiliki gedung senilai satu miliar, maka asset yang dihitung adalah satu miliar itu. Selain gedung, yang bisa dihitung sebagai asset bisa termasuk: merk dagang, paten teknologi, uang kas, mobil, dan lain lain (Chapra, 2007).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil; *Investment Account Holders* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil; Tidak ada pengaruh Modal Bank terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil serta *Assets Bank* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil.

### Saran

Adapun saran yang dapat diajukan oleh peneliti dari hasil penelitian yang telah dilakukan :

1. Penelitian ini tidak melibatkan variabel-variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi (memodifikasi) model penelitian yang telah dipaparkan misalnya variabel faktor ekonomi makro, regulasi perusahaan, budaya organisasi, perilaku kepemimpinan dan karakteristik responden.
2. Apabila penelitian dilakukan secara longitudinal, maka sebaiknya pada penelitian selanjutnya dimasukkan konsep pengukuran harapan manajer dan kinerja. Dengan menggunakan gap antara harapan dengan kinerja sehingga akan diperoleh nilai-nilai/hasil yang mungkin lebih objektif serta variabel-variabel demografi responden sebaiknya dimasukkan dalam pengukuran persepsi (sebagai variabel kontrol), untuk mengurangi bias.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, G., Bhutto, N.A., dan Memon, F., 2009, Corporate Governance and Earnings Management: An Empirical Study of the Saudi Market, *Journal of American Academy of Business*, Vol 14, No.2
- Abdullah, M.A, 2010, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*. Ar-Ruzz Media : Yogyakarta
- Al Arif, M.N Rianto dan Nurhikmah, I, 2018, Determinan Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia Model Regresi Panel. Al-Falah, *Journal of Islamic Economics* . Vol. 2. No. 1

- Al- Baidhani, A. M, 2013, *The Effect Of Corporate Governance On Bank Performance*. Cairo German University in Cairo
- Algifari, 2000, *Analisis Regresi, Teori, Kasus & Solusi*. Yogyakarta, BPFE UGM
- Andypratama, L.W dan Ronny H.M, 2013, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Keluarga : Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan. *AGORA* Vol. 1, No. 1
- Antonio, M.S, 2000. *Bank : Suatu Pengantar Umum*, Edisi Khusus, Jakarta, Tazkia Institute
- Antonio, M.S, 2005. *Bank Syari'ah : Teori dan Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press
- Arifani, R, 2013, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Universitas Brawijaya* Volume 1 Nomor 2
- Chapra, M.U, 2007, *Challenges facing governance in Islamic financial industry*, in Hasan, M.K. and Lewis, M.K. (Eds), *HandBooks of Islamic Banking*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham
- Daulay, R. 2010, Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah Kota Medan, *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 10, (1 April 2010), 4-5
- Dewi, R dan Widagdo, B, 2012, Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol 2. No.1
- Faozan, A, 2013, Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol VII. No.1
- Farook, *et al*, 2011, Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The case of Islamic Banks, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 114- 141
- Friyanto, 2013, Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 15, (2), September 2013, 114-115
- Gagaring, P, 2011, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No.1. Universitas Hasanudin
- Ghozali, I, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- Greening, H.V dan Iqbal, Zamir, 2011, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis For Islamic Banks)*, Jakarta, Salemba Empat
- Gregory, H.J. dan Simms, M.E. 1999, *Corporate Governance: What It Is And Why It Matters*, The 9th International Anti-Corruption Conference, Kuala Lumpur
- Haniffa, R. dan Hudaib, M. 2006, Corporate Governance Structure And Performance Of Malaysia Listed Companies, *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol. 33. No 7
- Hardiyanti, N, 2012, Analisis Pengaruh Insider Ownership, Leverage, Profitabilitas, Firm Size Dan Dividen Payout Ratio Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2007-2010
- Hery. 2010. *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung : Alfabeta
- Hoque, M. Z., M. R. Islam, dan H. Ahmed. 2012, Corporate governance and bank performance: case in Bangladesh. Available from: Social Science Research Network [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2208903](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2208903), 1-37.



- Jalaludin. A, 1999. *Attitudes of Australian Small Business Firm and Finance Institutions Toward the Profit/Loss Sharing Method of Finance*, University of Wollongong Australia
- Jensen, M. C dan Meckling, W.H, 1976, Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp.305-360.
- Kalbarini, R.Y dan Suprayogi, Noven, 2014, Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta), *JESTT*, Vol. 1 No. 7
- Karim, A, 2010, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Kholid dan Bachtiar, 2015, Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia, *Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin*
- Kirpatrick, G, 2009, *The Corporate Governance Lessons form the Financial Crisis, Financial Market Trends*, OECD, Paris, OECD Pre-publication version
- Kurniawansyah, Deddy, 2016, Pengaruh Profit Loss Sharing Funding Ratio dan Profit Loss Sharing Financing Ratio Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari'ah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 18. No. 1
- Macey, J.R. dan M. O'Hara, 2003, The Corporate Governance of Banks, *Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review*., Vol. 9 No.1
- Mallat, C, 2000, Commercial Law in the Middle East: Between Classical Transaction and Modern Business, *The American Journal of Comparative Law*, Vol 48, No 1. 81-141
- Mannan M, A, 1997, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta
- Muhammad, 2001, *Konstruk Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: BPFE
- Muhammad, 2005, *Managemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, UPP.AMP YKPN : Yogyakarta
- Muttakin, M. B, dan M. S. Ullah, 2012, *Corporate Governance And Bank Perfomance: Evidence From Bangladesh*, Corporate Board: Role, Duties & Composition, Vol 8. No 1. 62-68.
- Mutasowifin, A, 2003, Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim. *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol.3. No. 1
- Mutmainah, Siti. 2017. Tata Kelola Dan Risiko Bank Syariah Di Indonesia Periode 2008-2016. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol 14. No 2
- Mohammed, M. O., Razak, A. D., & Taib, F. M, 2008, The Performance Of Islamic Banking Based On The Maqasid Syariah. *International Islamic University Malaysia Journal*
- Mollah, S., Hassan, M.K. dan Al-Farooque, 2014, *Corporate Governance, Risk-Taking And Firm Performance Of Islamic Banks During Global Financial Crisis*, Paper Presented At The Seminar On Finance And Development In Muslim Economies
- Mollah, S, dan M. Zaman, 2015, Shariah Supervision, Corporate Governance, And Performance: Conventional Vs Islamic Banks, *Journal of Banking and Finance* 58: 418-435
- Novarela. D dan Sari, I.M, 2015, Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2. No. 2

- Nugroho, F.A dan Raharjo, S.N, 2013, Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 3 No 2
- Pathan, S. and Skully, M, 2010, Endogenously structured board of directors in bank. *Journal of banking and Financial*. Vol 34 No7
- Rachdi, H. dan Ben A. I.G, 2011, Board characteristics, performance and risk taking behavior in Tunisian banks. *International Journal of Business and Management*. Vol 6 No 6
- Rahmawati, Inge Andhitya, Brady Rikumahu dan Vaya Juliana Dillak. 2017, Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE Un PGRI Kediri*. Vol 2. No 2
- Reni, D.M dan Atiqi C, 2014, Impact of Perception of Islamic Bank Manajemen on Islamic Bank to The Social and Economic Performance Using Maqasid Al-Sharia Approach. *Proceedings of Developing A Framework For Maqasid Al-Sharia-Based Index of Socio Economic*
- Rezaee, Z, 2007, *Corporate Governance Post Sarbanes Oxley: Regulations, Requirements, and Integrated Processes*. New Jersey, John Wiley & Sons.
- Rivai, 2010., *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sadr, K, 1996, *The Role of Musharakah Financing in the Agricultural Bank of Iran*. *Arab Law Quarterly*.
- Sam'ani, 2008, *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2004 – 2007*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Santoso, S, 2004., *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11.5*, Jakarta, Elex Media Komputindo
- Setyawan, C.D dan Adityawarman, 2017, Pengaruh Dewan Komisaris Dan Investment Account Holders Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia, *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 6. No 3
- Sjahdeini, S.R, 2000, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti
- Sutedi, A, 2011. *Good Corporate Governance*, Jakarta .Sinar Grafika
- Sutrisno, 2015, Pengaruh Kebijakan Pembiayaan dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Management and Business Review*, Vol 12, No 1
- Susana, E dan Prasetyanti, A, 2011. Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 15. No. 3, 466-47
- Syam, D, dan T. Najda, 2012, Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Terhadap Tingkat Pengembalian Dan Resiko Pembiayaan. *Jurnal Review Akuntansi Keuangan*. Vol 2. No 1: 195-206
- Tarsidin, 2010, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

- Triyuwono.I,2007,Mengangkat ”sing liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah, *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas*. Vol 26. No 28
- Walker, D.C , 2001, Exploring the Human Capital Contribution to Productivity, Profitability, and the Market Evaluation of The Firm. <http://wwwlib.umi.com/dissertations/preview/all/3010003>
- Warde, I,2000, The Revitalization of Islamic Profit-and-loss Sharing. Proceeding of the The Harvard University Forum on Islamic Finance”, Oktober 1, Cambridge: Harvard,*Islamic Finance Information Program Centre for Middle Easter Studies*
- Widjaja, G, 2003,*Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*,Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Wiroso, 2005,*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grasindo